

ABSTRAK

Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara memiliki kewenangan untuk melakukan pengelolaan investasi yang dilakukan oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Menurut pandangan DPR, proses pembelian saham divestasi PT. NNT oleh PIP merupakan bentuk penyertaan modal. Hal ini sebagaimana didasarkan pada Pasal 24 ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara sehingga Pemerintah perlu mendapatkan persetujuan DPR. Namun, hal ini perlu ditinjau lebih lanjut karena pembelian saham oleh pemerintah tidak hanya diatur oleh Undang-Undang Keuangan Negara. Sebab dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara juga diatur lebih spesifik mengenai kewenangan dari pemerintah didasarkan pada ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah *yuridis normatif*, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum, yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah dalam melakukan pembelian saham divestasi modal asing pada perusahaan penanaman modal di Indonesia. Spesifikasi Penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis yaitu menggabungkan dan menganalisis permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan. Tahap Penelitian yang dilakukan melalui Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) Berdasarkan penelitian ini penulis menghimpun data sekunder yang berupa bahan hukum premier yaitu bahan-bahan hukum yang mengingat, seperti norma atau kaidah dasar, peraturan Perundang-undangan, dan yurisprudensi. Bahan hukum sekunder yaitu para ahli dan hasil karya para ilmuwan yang berbentuk makalah atau karya tulis

Pembelian saham divestasi perusahaan penanaman modal asing di Indonesia tepat untuk didasarkan pada ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. Berkenaan dengan pembelian saham dalam proses divestasi PT. Newmont Nusa Tenggara oleh Pemerintah tidak diperlukan persetujuan DPR sebab pembelian saham divestasi merupakan investasi pemerintah yang terencana dalam APBN. Namun, DPR tetap dapat menjalankan fungsinya, yaitu melakukan fungsi pengawasan dalam pelaksanaan APBN oleh Pemerintah. Berdasarkan peraturan pemerintah No 1 Tahun 2008 tentang investasi, dalam rangka pengelolaan investasi pemerintah dapat melakukan investasi jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan manfaat lainnya. Investasi demikian dilakukan dalam bentuk saham, surat hutang dan investasi langsung. Maka kewenangan pemerintah dalam membeli 7% saham PT. Newmont Nusa Tenggara merupakan kewenangan yang di berikan oleh undang-undang dasar dan termasuk golongan transaksi investasi surat berharga dan bukan sebagai transaksi penyertaan modal

ABSTRACT

The Minister of Finance as the State General Treasurer has the authority to manage investments made by the Government Investment Center (PIP). In the view of the DPR, the process of purchasing divestment shares of PT. NNT by PIP is a form of capital participation. This is as based on Article 24 paragraph (7) of Law Number 17 of 2003 concerning State Finance so that the Government needs to obtain DPR approval. However, this needs to be reviewed further because the purchase of shares by the government is not only regulated by the State Finance Act. Because in Law Number 1 of 2004 concerning State Treasury, it is also regulated more specifically regarding the authority of the government based on the provisions of Article 41 of Act Number 1 of 2004 concerning State Treasury.

The method used in the study is normative juridical, namely research that refers to legal norms, which are contained in laws and regulations relating to government authority in purchasing foreign capital divestment shares in investment companies in Indonesia. The research specifications used are descriptive analytical, namely describing and analyzing problems based on relevant legislation. Stage of Research carried out through Research Library (Library Research) Based on this study the authors collected secondary data in the form of premier legal materials, namely legal materials that remember, such as basic norms or rules, legislation, and jurisprudence. Secondary legal materials, namely experts and the work of scientists in the form of papers or written works

The purchase of divestment shares in foreign investment companies in Indonesia is appropriate to be based on the provisions of Article 41 of Law Number 1 of 2004 concerning State Treasury. With regard to the purchase of shares in the process of divestment of PT. Newmont Nusa Tenggara by the Government does not require DPR approval because the purchase of divested shares is a planned government investment in the State Budget. However, the DPR can still carry out its functions, namely carrying out the supervisory function in the implementation of the State Budget by the Government. Based on government regulation No. 1 of 2008 concerning investment, in order to manage investment the government can make long-term investments to obtain economic, social benefits and other benefits. Such investments are made in the form of shares, debt securities and direct investment. So the authority of the government in buying 7% of the shares of PT. Newmont Nusa Tenggara is an authority granted by the constitution and includes a group of securities investment transactions and not as a capital investment transaction